JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 7 NO 2
JULI 2021

jrak@plb.ac.id

ANALISIS KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENDEKATAN TEORI INSTITUSIONAL ISOMORFISME

Dwi Winarni dan Luthfi Zamakhsyari - Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

Changes to a system within the organization are carried out simply to get recognition or awards rather than to improve performance substantively. Performance reports that have been made by government agencies are only meant to fulfill regulatory and regulatory requirements and do not reflect the performance that occurs in the field. This study examines and analyzes how local governments improve the quality of accounting information in terms of institutional isomorphism theory. The research method used is a qualitative method so that it can explore and understand the data in more depth. The local government in Indonesia was chosen as the object of research because it has a characteristic in the current application of New Public Management (NPM). The analysis was carried out using three indicators that describe institutional isomorphism (coercive, mimetic, and normative). The results show that regulation, management commitment, and human resource competence have a positive impact on the implementation of the preparation of financial statements according to standards and the quality of accounting information produced.

Keywords: *Quality of Accounting Information, Institutional Isomorphism, Regulation, Management Commitment, Human Resources*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya reformasi bidang akuntansi di Indonesia terus dilakukan, diantaranya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan dikembangkan dengan mengacu pada *Internatonal Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan memperhatikan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selain berisi tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, didalamnya juga membahas karakteristik kualitatif

informasi akuntansi yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Selanjutnya, sumber daya manusia menjadi bagian yang penting dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi (Zhou, 2010). Mbelwa (2015) menjelaskan bahwa faktor internal institusional mempengaruhi informasi akuntansi yang berasal dari kualitas sumber daya manusia dan komitmen manajemen. Alasan utama sebagai dasar perubahan sistem pada organisasi adalah hanya sekedar untuk mendapatkan legitimasi daripada meningkatkan kinerja secara substantif (Ashworth, Boyne, & Delbridge, 2007). Laporan kinerja yang selama ini dibuat oleh instansi pemerintah hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban persyaratan regulasi dan peraturan, tidak secara substantif mencerminkan kinerja yang terjadi di lapangan. Hal ini kemudian bisa menyesatkan publik sebagai pengguna informasi dan pada akhirnya berakibat pada ekspektasi publik yang berlebihan terhadap instansi pemerintah (Ahyaruddin & Akbar, 2016).

Isomorfisme adalah keadaan di mana lembaga-lembaga dalam lingkungan menjadi lebih homogen untuk tujuan sosial, politik atau legitimasi dengan adanya intensitas tekanan sosial dan politik. Kekuatan koersif, mimetik, dan normatif menyebabkan lingkungan yang memacu kesesuaian organisasi, atau homogenitas, melalui tekanan yang legal atau sah, mandat yang terkait dengan pendanaan, nilai-nilai kelompok dan jaringan profesional yang berpengaruh. Selanjutnya, perubahan isomorfisme terjadi ketika lembaga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan yang menentukan seberapa diakui, organisasi yang sukses harus melihat, membatasi kemampuan dan memotivasi pembuat keputusan untuk memahami dan mengimplementasikan jenis perubahan organisasi tertentu (DiMaggio & Powell, 1983). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka motivasi penelitian ini adalah untuk menguji kualitas informasi akuntansi ditinjau dari teori institusional isomorfisme. Penelitian ini menggunakan teori institusional isomorfisme, karena teori tersebut banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena serta memberikan pandangan yang kompleks dalam lingkungan organisasi sektor publik.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif sehingga dapat mengeksplorasi dan pemahaman data secara lebih mendalam. Pemerintah daerah di Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki ciri khas dalam penerapan New Public Manajemen (NPM) saat ini. Pemerintah daerah di berikan kebijakan oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan reformasi NPM dan adopsi teknik-teknik pada sektor publik, terutama reformasi akuntansi di negara-negara berkembang (Adhikari & Mellembvik, 2011). Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya dengan metode campuran pada SKPD di Pemerintah Daerah Sleman. Hasil penelitian awal dengan metode campuran menggunakan desain sekuensial eksplanatori kemudian pada penelitian ini dikembangkan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan perlu dianalisis secara mendalam menggunakan pertanyaan penelitian terperinci.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kualitas informasi akuntansi ditinjau dari teori institusional isomorfisme. Sehingga, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah dalam merespon regulasi yang harus

diterapkan, komitmen manajemen dalam mendorong kemajuan bagi organisasi, dan sumber daya manusia dalam meningkatkan penyediaan layanan dengan kualitas yang relevan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini sebagai pengembangan teori institusional isomorfisme koersif, mimetik dan normatif yang digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik khususnya pada pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Institusional Isomorfisme

DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan bahwa isomorfisme adalah “*constraining process*” yang memaksa satu unit dalam populasi untuk memiliki wujud atau sifat yang sama dengan unit yang lain, dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Isomorfisme menjelaskan tingkat kesesuaian organisasi dengan norma dan praktik yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Isomorfisme terdiri dari dua macam yaitu isomorfisme kompetitif dan institusional isomorfisme. Konsep isomorfisme kompetitif relevan dengan lingkungan bisnis atau kompetisi terbuka, sedangkan institusional isomorfisme relevan dengan persaingan bebas, seperti pada organisasi publik. DiMaggio & Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme isomorfisme yaitu mekanisme isomorfisme koersif, mimetik dan normatif.

Mekanisme isomorfisme koersif merujuk pada proses dimana organisasi mengadopsi fitur (sifat) tertentu karena paksaan (tekanan) dari negara, organisasi lain atau masyarakat (DiMaggio & Powell, 1983). Contoh isomorfisme koersif antara lain tekanan dari pemerintah pusat atau donor yaitu selaku pemberi dana. Tekanan tersebut dapat dirasakan sebagai kekuatan, persuasi atau ajakan untuk bergabung dalam kesepakatan. Isomorfisme koersif cenderung membentuk ketaatan yang semu atau sekedar ritual karena motivasinya hanya mengikuti aturan. Latar belakang isomorfisme koersif adalah tekanan formal dan informal oleh badan legislatif suatu negara, pembuat kebijakan, serta harapan masyarakat pada organisasi. Mekanisme isomorfisme mimetik terjadi karena adanya peniruan, yaitu terjadi pada saat organisasi mengalami ketidakpastian mengenai suatu operasi atau proses (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam situasi ini sebuah organisasi akan meniru organisasi lain dengan cara melakukan *benchmarking*, studi banding atau memakai jasa konsultan. Lingkungan yang tidak pasti dapat menjadi kekuatan yang mendorong organisasi untuk meniru satu sama lain dalam lingkup organisasi yang sama. Selanjutnya, isomorfisme mimetik dapat berfungsi sebagai solusi praktis bagi organisasi yang tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Organisasi menerapkan struktur yang hampir mirip dengan organisasi yang lebih sukses. Mekanisme isomorfisme normatif berkaitan dengan paksaan atau tuntutan muncul dari profesi. Tekanan normatif pada suatu organisasi berpotensi memiliki dampak yang penting, pengalaman individu dalam organisasi dapat mengarah pada apakah organisasi akan dianggap sah atau tidak. Kualifikasi dan karakteristik individu membantu organisasi untuk mencapai kesesuaian dalam bidang organisasi. Misalnya, bidang akuntansi tidak akan dianggap sah jika karyawannya tidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai akuntan. Organisasi publik menjadi salah satu subjek tekanan institusional sehingga pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip. Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kualitas informasi akuntansi berkaitan dengan institusional isomorfisme adalah regulasi, komitmen manajemen dan sumber daya manusia.

Regulasi

Nurdin, Stockdale, & Scheepers, (2012) dalam penelitiannya menjelaskan salah satu indikator teori institusional isomorfisme koersif yang dilakukan pada organisasi pemerintah daerah adalah regulasi. Brignall & Modell (2000) menjelaskan bahwa regulasi merupakan sebuah mandat legislatif yang menjadi salah satu faktor yang relevan terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi di organisasi pemerintah. Pemerintah pusat dapat memberlakukan undang-undang dan regulasi yang akan mempengaruhi pemerintah daerah dan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan sumberdaya keuangan serta memerlukan sebuah pengakuan melalui berbagai sistem penghargaan dari pemerintah pusat (Akbar, Pilcher, & Perrin, 2012). Regulasi juga merupakan penggerak untuk suatu perubahan bagi manajer publik di Inggris (Talbot, 2008). Namun, secara keseluruhan, penelitian dalam teori organisasi cenderung melihat lembaga sektor publik lebih berperan sebagai katalisator dan pemicu pelembagaan di organisasi lain, daripada sebagai objek tekanan institusional. Melalui regulasi, akreditasi, pengawasan, dan hubungan pendanaan, organisasi sektor publik telah digambarkan sebagai kekuatan yang mendorong organisasi nirlaba dan perusahaan bisnis menuju tingkat homogenitas yang lebih besar. Organisasi tidak selalu merangkul strategi, struktur, dan proses yang meningkatkan kinerjanya tetapi, sebaliknya bereaksi dan mencari cara untuk mengakomodasi tekanan mengikuti pengawasan dan regulasi eksternal (Frumkin & Galaskiewicz, 2004).

Komitmen Manajemen

Mbelwa (2015) menjelaskan komitmen manajemen merupakan faktor internal institusional yang dapat mempengaruhi informasi akuntansi. Dacin & Delios (2005) menjelaskan bahwa tekanan institusional dapat menyebabkan masalah karakter dan integritas pada organisasi. Hal tersebut diperlukan komitmen manajemen yaitu berupa keberhasilan implementasi dari suatu perubahan. Faktor institusional dapat dibentuk melalui tekanan koersif dan normatif terhadap penggunaan informasi akuntansi (Suddaby, 2010). Isomorfisme koersif dan normatif dapat digambarkan melalui faktor dapat memengaruhi kualitas informasi akuntansi, yaitu komitmen manajemen. Organisasi memiliki peluang yang besar apabila adanya komitmen yang kuat dalam organisasi (Morgan, Amy J. & Inks, 2001). Selanjutnya komitmen manajemen merupakan faktor organisasi yang memengaruhi penggunaan informasi kinerja dalam informasi akuntansi (Dull, 2009; Moynihan & Pandey, 2010). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.25/KEP/M.PAN/2002 menyatakan pengertian komitmen manajemen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap, dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Faktor kontingensi merupakan bagian dari sumber daya manusia seperti lingkungan akuntansi sebagai bidang profesional, yang berimplikasi pada pengolahan informasi akuntansi. (DiMaggio & Powell, 1983) menjelaskan bahwa isomorfisme normatif terkait dengan profesionalisme. Profesionalisme merupakan suatu hal yang terkait dengan Integritas dan kompetensi Sumber daya manusia di Organisasi itu sendiri. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme. Sumber daya manusia ada kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh

keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan asset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi (Fardian, 2014). Sumber daya manusia, adalah suatu potensi yang terdapat pada diri manusia. Potensi sangat berguna di dalam dunia kerja, karena dalam lingkungan kerja harus memiliki keahlian/kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, dengan tujuan dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

Sumber Daya Manusia yang didukung dengan pelatihan, teknologi seperti *software* akan sangat membantu kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Selain itu juga ada nya pengawasan dan kontrol dari Inspektorat, pengawasan internal menjadi kebutuhan agar cermat, fungsi kontroling membantu manajemen dalam fungsi kontroling. (Winarni & Akbar, 2020). Isomorfisme normatif biasanya berhubungan dengan profesionalisme dan suatu cara kolaborasi formal dan informal yang dapat mengarah pada homogenisasi organisasi. Profesionalisme yang muncul dalam konteks isomorfisme ini bersumber dari pendidikan formal dan perluasan jaringan profesional yang dilakukan oleh organisasi. Kelompok profesional akan membagikan norma dan harapan kolektif secara berangsur-angsur mengenai perilaku apa yang diinginkan oleh regulasi atau aturan (DiMaggio & Powell, 1983).

Kualitas informasi Akuntansi

Institusi pemerintah daerah didorong oleh peraturan untuk menerapkan inisiatif atau kebijakan tertentu seperti penerapan sistem informasi akuntansi, dalam rangka peningkatan kualitas informasi akuntansi (Akbar, Pilcher, Perrin, Pilcher, & Perrin, 2012). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi

utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu:

- a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operas entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PEMBAHASAN

Analisis Data Tematik

Data kualitatif yang diperoleh diolah dan disiapkan untuk dianalisis sehingga dapat diinterpretasikan. Hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis isi tematik, yaitu sebagai sebuah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola (tema) di dalam suatu kelompok data (Braun & Clarke, 2013). Tema utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana teori institusional isomorfisme dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas informasi akuntansi. Pendekatan teori institusional isomorfisme koersif, mimetik dan normatif

digunakan untuk menganalisis penerapan regulasi, komitmen manajemen dan sumber daya manusia dalam kontribusinya terhadap kualitas informasi akuntansi yang berkualitas. DiMaggio & Powell (1983), menjelaskan bahwa isomorfisme koersif berkaitan dengan tekanan yang dihadapi organisasi untuk berubah atau melakukan tindakan, mimetik mengacu pada organisasi yang mirip satu dengan yang lainnya, sedangkan isomorfisme normatif berkaitan dengan norma-norma ataupun pemahaman kognitif profesional. Hasil analisis isi tematik berdasarkan bukti yang diperoleh dari wawancara kepada responden untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kualitas informasi akuntansi ditinjau dari teori institusional isomorfisme di jelaskan secara lebih detil berikut ini.

Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa, perangkat daerah mematuhi peraturan atau regulasi, tuntutan regulasi diterapkan dan dipatuhi untuk sistem dan metode akuntansi yang lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan hasil analisis wawancara juga menunjukkan bahwa dalam bidang akuntansi, untuk tekanan eksternal yaitu regulasi dapat di jadikan tantangan, karena pada dasarnya akuntansi merupakan kebutuhan untuk setiap instansi di pemerintah daerah. Dengan demikian regulasi merupakan bagian dari motivasi bagi pemerintah daerah seperti penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahah berbaasis akrual dan juga membahas tentang karakteristik laporan keuangan harus mencerminkan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sehingga reformasi akuntansi di sektor publik khususnya pemerintah daerah dapat berhasil. Akbar (2011) menjelaskan bahwa tiga komponen institusional isomorfisme, yaitu koersif, mimetik, dan normatif, ada dalam proses pengembangan indikator kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia. Isomorfisme koersif memiliki peran paling dominan karena tuntutan regulasi. Di Indonesia, sumber tekanan isomorfik berpotensi berasal dari pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan yang akan mempengaruhi pemerintah daerah. Peraturan tersebut antara lain Inpres No. 7/1999 yang mewajibkan semua instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk melaporkan kinerjanya kepada pemerintah pusat. Tekanan koersif ini cenderung terjadi karena sebagian besar pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk sumber daya keuangan mereka atau pengakuan melalui beberapa sistem penghargaan. tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan eksternal menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan atau peningkatan kualitas informasi akuntansi. Tekanan eksternal dapat bersumber dari adanya isomorfisme koersif maupun normatif. Seperti adanya peraturan atau regulasi, tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan (Winarni & Akbar, 2020).

Komitmen Manajemen

Hasil analisis yang dihasilkan dari wawancara melalui perspektif teori institusional isomorfisme koersif dan normatif menunjukkan manajemen memiliki peran dalam mendukung agar para akuntan dapat mematuhi dan bekerja sesuai aturan dan memeberikan penjelasan cara bagaimana menjalankan isi dari peraturan. Manajemen juga mendorong para akuntan yang ada di dalam instansi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dilakukan dengan pelatihan dan pemanfaatan teknologi yaitu aplikasi yang terintegrasi dapat memudahkan pegawai. Komitmen manajemen menjadi bagian penting karena berperan dalam perubahan, implementasi

maupun pengambilan keputusan. Adanya komitmen manajemen mendorong sumber daya manusianya untuk mentaati peraturan dan berkinerja untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Winarni & Akbar, 2020). Ikhsan & Sari (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa evaluasi target serapan anggaran, mendukung pelatihan terkait pengadaan, menerapkan sistem honor sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi merupakan bukti adanya komitmen manajemen yang baik dari kepala SKPD terkait penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan yang wajib diikuti apabila terdapat perubahan peraturan dari pemerintah pusat. Meskipun sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi bukan lulusan pendidikan akuntansi, tetapi dapat memiliki kompetensi akuntansi apabila mengikuti pelatihan setara dengan akuntan profesional. Selain dilakukan pelatihan, untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki juga dilakukan program studi lanjut. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia juga dilakukan studi banding atau berbagi informasi dengan organisasi lain yang lebih berhasil. Menggunakan jasa konsultan juga sering dilakukan untuk mencari solusi atas kendala dalam proses pelaksanaan penerapan suatu sistem. Studi banding dan pemakaian jasa konsultan mencerminkan isomorfisme mimetik yaitu organisasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan organisasi lain dalam menjalankan sistem atau suatu regulasi. Pendidikan menjadi salah satu faktor internal institusional yang diperhitungkan, namun pelatihan juga menjadi bagian yang sangat penting bagi sumber daya manusia di bidang akuntansi (Winarni & Akbar, 2020). Akuntabilitas dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan ketika sumber daya manusia mengikuti pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. Interaksi secara profesional dengan yang lain pada kegiatan pelatihan merupakan isomorfisme normatif (Akbar, Pilcher, Perrin, et al., 2012). Hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja dan berasal dari internal organisasi serta segala usaha yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia mendorong peningkatan kualitas informasi akuntansi.

KESIMPULAN

Analisis dilakukan menggunakan tiga indikator yang menggambarkan institusional isomorfisme (koersif, mimetik dan normatif) yaitu regulasi, komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia. Hasilnya bahwa kualitas informasi akuntansi ditinjau dari teori institusional isomorfisme menunjukkan pengaruh baik yang dapat memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Pertama, regulasi dianalisis menggunakan teori institusional isomorfisme koersif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung mentaati peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut berkaitan dengan perbaikan sistem atau metode yang diterapkan agar lebih baik. Selain itu pemerintah daerah diwajibkan oleh pemerintah pusat dalam menerapkan suatu peraturan. Dalam peningkatan kualitas informasi akuntansi dengan reformasi akuntansi yaitu terbitnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintah. Peraturan tersebut selain agar pemerintah daerah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual secara bertahap juga membahas karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kedua, komitmen

manajemen ditinjau dari isomorfisme koersif dan normatif menunjukkan bahwa komitmen manajemen memiliki peran dalam mendukung agar akuntan dapat mematuhi dan mengimplementasikan regulasi. Manajemen juga mendorong para akuntan yang ada di dalam instansi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dilakukan dengan pelatihan, studi banding maupun studi lanjut. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia dianalisis melalui pendekatan isomorfisme koersif dan mimetik. Hasil analisis wawancara menunjukkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, studi lanjut, studi banding dan penggunaan jasa konsultan. Hal tersebut dilakukan agar akuntan yang dimiliki organisasi dapat terhubung atau bergabung dengan organisasi profesi untuk menggali informasi dan mencontoh organisasi yang lebih berhasil. Sehingga, secara profesional dapat menyelesaikan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, P., & Mellemvik, F. (2011). The rise and fall of accruals: a case of Nepalese central government. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 1(2), 123–143. <https://doi.org/10.1108/20421161111138495>
- Akbar, R. (2011). Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Government, 1–24.
- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). *Performance measurement in Indonesia: the case of local government*. *Pacific Accounting Review* (Vol. 24). <https://doi.org/10.1108/01140581211283878>
- Akbar, R., Pilcher, R., Perrin, B., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). *Performance measurement in Indonesia : the case of local government*. <https://doi.org/10.1108/01140581211283878>
- Ashworth, R., Boyne, G., & Delbridge, R. (2007). Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), 165–187. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum038>
- Braun, V., & Clarke, V. (2013). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 77–101. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the “new public sector.” *Management Accounting Research*, 11(3), 281–306. <https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136>
- Dacin, T., & Delios, A. (2005). Editors’ introduction: Special issue on networks in Asia Pacific business. *Asia Pacific Journal of Management*, 22(4), 315–320. <https://doi.org/10.1007/s10490-005-4112-1>
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields Author (s): Paul J . DiMaggio and Walter W . Powell Source : American Sociological Review , Vol . 48 , No . 2 (Apr . , 1983), pp . 147-160 Published. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dull, M. (2009). Results-model reform leadership: Questions of credible commitment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(2), 255–284. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum043>
- Fardian, D. (2014). PENGARUH FAKTOR POLITIK, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN

- DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–18. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1525>
- Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional isomorphism and public sector organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 14(3), 283–307. <https://doi.org/10.1093/jopart/muh028>
- Ikhsan, M., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Komitmen Manajemen, Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(4), 3705–3719.
- Mbelwa, L. (2015). Factors Influencing The Use Of Accounting Information In Tanzanian Local Government Authorities (LGAS): An Institutional Theory Approach. *The Public Sector Accounting, Accountability and Auditing in Emerging Economies*, 15, 143–177. <https://doi.org/10.1108/S1479-356320150000015001>
- Morgan, Amy J. & Inks, S. A. (2001). Technology and the Sales Force Increasing Acceptance of Sales Force Automation. *Industrial Marketing Management*, 463–472. [https://doi.org/10.1016/S0019-8501\(99\)00115-7](https://doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00115-7)
- Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2010). The big question for performance management: Why do managers use performance information? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(4), 849–866. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq004>
- Muhammad Ahyaruddin, & Akbar, R. (2016). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional. *1th Celscitech*, 1(2009), 39–45.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2012). The influence of external institutional pressures on local e-government adoption and implementation: A coercive perspective within an Indonesian local e-government context. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 7443 LNCS, 13–26. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_2
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (2010).
- Suddaby, R. (2010). Challenges for institutional theory. *Journal of Management Inquiry*, 19(1), 14–20. <https://doi.org/10.1177/1056492609347564>
- Talbot, C. (2008). Performance regimes - The institutional context of performance policies. *International Journal of Public Administration*, 31(14), 1569–1591. <https://doi.org/10.1080/01900690802199437>
- Winarni, D., & Akbar, R. (2020). Faktor Tekanan Institusional Dalam Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi: Pendekatan Metoda Campuran. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 1–11. Retrieved from <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Zhou, L. (2010). The Research on Issue and Countermeasures of Accounting Information of SMES. *International Journal of Business and Management*, 5(3), 223–225. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n3p223>